

2022



LPPD

LAPORAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut

Jl. H. Boejasin No.09 Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21098

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia

Nya Sehingga Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat (1) Mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD Dinas Kesehatan Tanah Laut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategi (RENSTRA)

Dalam Rangka memenuhi maksud ketentuan diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut telah menyusun bahan LPPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah secara lebih efektif dan edisien.

Semoga upaya kita mendapat Rahmad, Hidayah dan Ridha Nya. Aamiin.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut,



dr. Hj. Isna Farida, M.Kes

NIP. 19740612 200501 2 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi dan Misi Daerah.....	1
1.3 Data Umum Daerah.....	2
1.4 Perencanaan Pembangunan Daerah	17
1.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	21
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	24
 PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Capaian Pelaksanaan Kinerja	24
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	25
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	26
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	35
2.3 Akuntabilitas Kinerja Organisasi	40
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
 PEMBANTUAN	45
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
 MINIMAL.....	47
4.1 Jenis Pelayanan Dasar	47
4.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	49
4.3 Realisasi	55
BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	7
Tabel 1.2 Komposisi Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Angka Pertumbuhan Penduduk	8
Tabel 1.3 Daftar Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan	9
Tabel 1.4 Tabel Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	12
Tabel 1.5 Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan Tahun 2022	12
Tabel 1.6 Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT menurut tingkat pendidikan tahun 2022	14
Tabel 1.7 Realisasi Pendapatan Tahun 2022	16
Tabel 1.8 Realisasi Belanja Tahun 2022.....	17
Tabel 1.9 Tabel Prioritas Pembangunan Daerah.....	20
Tabel 1.10 Tabel Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah.....	21
Tabel 1.11 Tabel Jenis Pelayanan Dasar SPM Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut.....	23
Tabel 2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama.....	24
Tabel 2.2 Tabel Indikator kinerja kunci keluaran	26
Tabel 2.3 Tabel Indikator Kinerja Kunci Hasil	35
Tabel 2.4 Tabel Target dan Realisasi Capaian Kinerja.....	40
Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Pada Bidang Kesehatan Tahun 2022	47
Tabel 4.2 Target Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2022	49
Tabel 4.3 Target Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2022	50
Tabel 4.4 Target Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2022.....	50
Tabel 4.5 Target Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2022	50
Tabel 4.6 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	51
Tabel 4.7 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2022	51
Tabel 4.8 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2022	52
Tabel 4.9 Target Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2022	52
Tabel 4.10 Target Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.....	53
Tabel 4.11 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	53
Tabel 4.12 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Tahun 2022	54
Tabel 4.13 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2022	54
Tabel 4.14 Tabel Indikator Pencapaian SPM Ibu hamil s.d Balita.....	55
Tabel 4.15 Tabel Indikator Pencapaian SPM Usia Pendidikan Dasar S.d Penderita Hipertensi	57

Tabel 4.16 Tabel Indikator Pencapaian SPM Diabetes Melitus s.d HIV	59
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Tanah Laut dibentuk dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Pelaihari dan terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelaihari, Jorong, Bati-Bati, Kurau dan Takisung.

Pada era desentralisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000 berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999, diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, maka beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah Daerah sebagai kewenangan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya bidang pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 24 Tahun 2009.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan maka perlu Mengevaluasi tugas pokok tersebut dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan (LKPJ) dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD.

1.2 Visi dan Misi Daerah

a. Visi Daerah

***“MEWUJUDKAN TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI
(BERkarya, INovasi, TERTata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”***

b. Misi Daerah

Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Data Umum Daerah

a. Data Geografis Daerah

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut yang beribukota Pelaihari berada di bagian selatan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30'20" - 115°20'00" Bujur Timur dan 3°30' 33" - 4°10' 30" Lintang Selatan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km² (363.135 Ha) atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km². Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Utara : Kota Banjarbaru
Selatan : Laut Jawa
Timur : Kabupaten Tanah Bumbu
Barat : Laut Jawa

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung didaerah pedalaman yang berbatas dengan Kabupaten Banjar. Secara umum

dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat di bagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa.
2. Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu:
 - Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)
 - Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
 - Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
 - Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
 - Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
 - Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Dilihat dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi , yaitu kelas 0 – 7 meter, 7 - 25 meter, 25 - 100 meter, 100 - 500 meter, 500 – 1000 meter dan diatas 1000 meter.

Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0 - 7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Kemudian kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya semakin peka tanah terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. 0 - 3 %, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan).
2. 3 – 8 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8 – 15 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47 % dari luas total daratan).
4. 15 – 25 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85 % dari luas total daratan).
5. 25 – 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87 % dari luas total daratan).
6. 40 % sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 13.545 Ha (3,63 % dari luas total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 67,16% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

Berdasarkan tinjauan terhadap peta geologi Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut berumur antara mesozoik, tersier dan kuartar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan dibagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pratersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu satuan morfologi dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan morfologi dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0 – 10 m dpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sediment kwarter. Satuan Morfologi Dataran

Bergelombang menempati bagian Barat dan Selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati, Pelaihari, Asam-asam, Pelaihari – Batakan dan Pelaihari – Takisung.

Ketinggian berkisar antara 10 – 50 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sediment kwarter dan tersier. Satuan Morfologi Perbukitan menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sediment serta sebagian kecil batuan beku. Satuan Morfologi Pegunungan menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 m dpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 m dpl), Gunung Batu Belerang (921 m dpl), Gunung Batu Karo (621 m dpl).

Jenis Tanah yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Laotosol. Sedangkan jenis tanah Gleisolhanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

1. Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
2. Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsure haranya relative kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).
3. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat

kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98% dari total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki tekstur tanah dengan klasifikasi yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.

Umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91 % dari luas total daratan), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12.54 % dari luas total daratan) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7.75 % dari luas total daratan). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7.75% dari luas total daratan) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

Kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut di klasifikasikan kedalam 4 (empat) kelas kedalaman efektif tanah yaitu dalam (lebih dari 90 cm) sedang (80 – 90 cm), dangkal (30 – 60 cm) dan sangat dangkal (kurang dari 30 cm). Kedalaman efektif tanah akan berpengaruh terhadap wilayah perakaran tanaman, jenis tanaman/tumbuhan dan tegakan tanaman.

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Berdasarkan hasil penelitian antara 1915 – 1941, curah hujan bagian Timur/pantai sebesar 2,324 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 150 hari/tahun dan di bagian Barat sampai dengan perbatasan kabupaten. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun.

Data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspirasi bulanan menyebabkan Kabupaten Tanah laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang water balance nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau : Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km²), Sungai Tabanio (770 Km²), Sungai Sabuhur (190 Km²), Sungai Swarangan (580 Km²). Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah-daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periodik. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.
2. Air Tanah : Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak pada ketinggian 0–1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya kan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

b. Jumlah Penduduk

Dilihat dari aspeknya penduduk mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan. Penduduk Kabupaten Tanah Laut berperan sebagai subyek dan obyek dari pembangunan itu sendiri. Sebagai subyek pembangunan, maka penduduk dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya sebagai obyek pembangunan, penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan menerima segala konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Adapun jumlah Penduduk Tanah Laut Semester I Tahun 2022 (data hasil integrasi dengan pemerintah pusat adalah 353.190 jiwa yang terdiri dari 179.610 laki-laki dan 173.580 perempuan dan masih tampak bahwa penyebaran Penduduk masih bertumpu di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah penduduk 78.793 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Bati-bati 44.712 jiwa dan Kecamatan Kintap 43.073 Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah penduduk 14.057 jiwa.

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Takisung	16.663	16.228	32.891
2	Jorong	17.762	16.684	34.446
3	Pelaihari	39.750	39.043	78.793
4	Kurau	7.147	7.031	14.178
5	Bati Bati	22.698	22.014	44.712
6	Panyipatan	12.745	12.590	25.335
7	Kintap	22.126	20.947	48.073
8	Tambang Ulang	9.400	9.107	18.507
9	Batu Ampar	14.273	13.560	27.833
10	Bajuin	9.928	9.437	19.365
11	Bumi Makmur	7.118	6.939	14.057
JUMLAH		179.610	173.580	353.190

c. Pertumbuhan Penduduk

Adapun Pertumbuhan Penduduk Tanah Laut Semester I Tahun 2022 (data hasil integrasi dengan pemerintah pusat adalah 353.190 jiwa yang terdiri dari 179.610 laki-laki dan 173.580 perempuan dan masih tampak bahwa penyebaran Penduduk masih bertumpu di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah penduduk 78.793 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Bati-bati 44.712 jiwa dan Kecamatan Kintap 43.073 Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah penduduk 14.057 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk semester II Tahun 2021 adalah 348.505 jiwa dengan penyebaran penduduk di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah penduduk 78.001 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Bati-Bati 44.156 jiwa dan Kecamatan Kintap 42.423 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bumi makmur dengan jumlah penduduk 13.920 jiwa.

Tabel 1.2 Komposisi Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Angka Pertumbuhan Penduduk

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin			
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Penduduk Sekarang (Jiwa)	Penduduk Semester II 2021 (Jiwa)
1	Takisung	16.663	16.228	32.891	32.561
2	Jorong	17.762	16.684	34.446	33.786
3	Pelaihari	39.750	39.043	78.793	78.001
4	Kurau	7.147	7.031	14.178	13.963
5	Bati Bati	22.698	22.014	44.712	44.156

6	Panyipatan	12.745	12.590	25.335	25.009
7	Kintap	22.126	20.947	48.073	42.423
8	Tambang Ulang	9.400	9.107	18.507	18.166
9	Batu Ampar	14.273	13.560	27.833	27.333
10	Bajuin	9.928	9.437	19.365	19.187
11	Bumi Makmur	7.118	6.939	14.057	13.920
JUMLAH		179.610	173.580	353.190	348.505

d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 memiliki 40 (empat puluh) perangkat daerah dan 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) unit kerja perangkat daerah. Dalam tabel dibawah ini disampaikan secara terperinci jumlah perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 1.3 Daftar Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan

No	Perangkat Daerah
1	Dinas Kesehatan
2	RSUD H.Boejasin
3	RSUD KH. Mansyur Kintap
4	UPT Laboratorium Kesehatan
5	UPT Instalasi Farmasi
6	UPT Puskesmas Pelaihari
7	UPT Puskesmas Asam-Asam
8	UPT Puskesmas Batakan
9	UPT Puskesmas Bati-Bati
10	UPT Puskesmas Jorong
11	UPT Puskesmas Kait-Kait
12	UPT Puskesmas Kintap
13	UPT Puskesmas Kurau

No	Perangkat Daerah
14	UPT Puskesmas Padang Luas
15	UPT Puskesmas Panyipatan
16	UPT Puskesmas Sungai Cuka
17	UPT Puskesmas Sungai Riam
18	UPT Puskesmas Tajau Pecah
19	UPT Puskesmas Takisung
20	UPT Puskesmas Tambang Ulang
21	UPT Puskesmas Tanjung Habulu
22	UPT Puskesmas Tirtajaya
23	UPT Puskesmas Angsau
24	UPT Puskesmas Bumi Makmur
25	UPT Puskesmas Durian Bungkok
26	UPT Puskesmas Bentok Kampung

e. Gambaran Umum Dinas Kesehatan

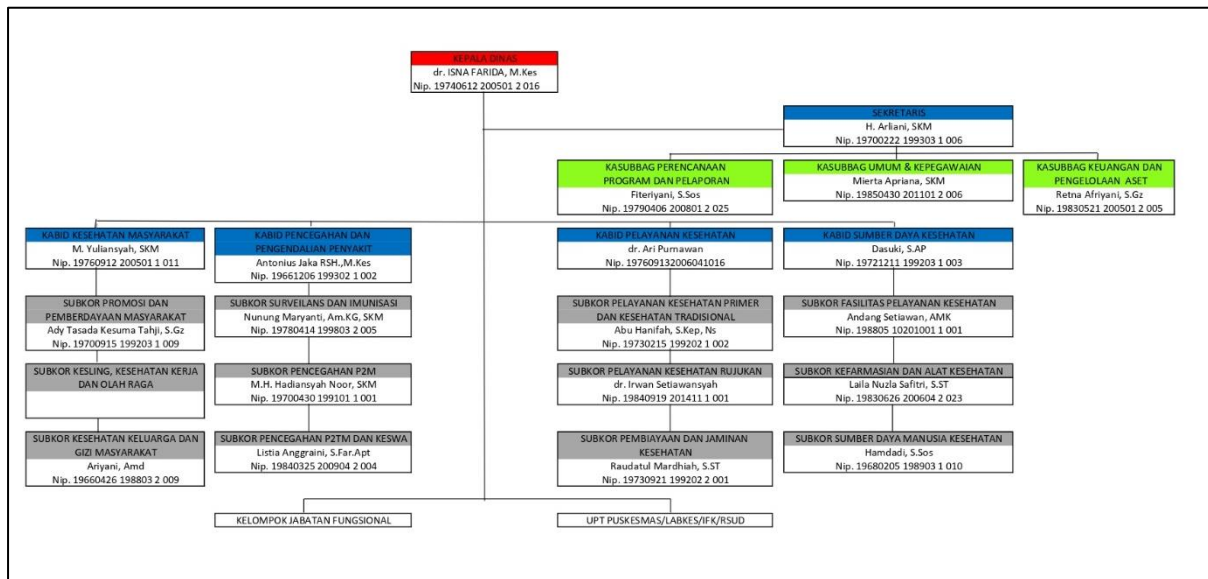
1. Struktur Organisasi

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
- b. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- c. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Susunan organisasi dinas kesehatan kabupaten tanah laut sesuai dengan peraturan bupati kabupaten tanah laut nomor 114 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah kabupaten tanah laut terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Bagian Sekretariat, Bidang Kesehatan

Masyarakat, Bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, UPT Dinas Kesehatan dan kelompok Jabatan Fungsional (dapat dilihat pada bagan SOTK).



Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subkor Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Subkor Kesling, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - c. Subkor Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - a. Subkor Surveilans dan Imunisasi.
 - b. Subkor Pencegahan P2M.
 - c. Subkor Pencegahan P2TM dan Keswa.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Subkor Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional.
 - b. Subkor Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - c. Subkor Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Subkor Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- b. Subkor Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- c. Subkor Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 6. UPTD Dinas
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 64 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 64 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 4 orang, Kepala Sub Bagian (Pejabat Pangawas) sebanyak 3 orang dan staf pelaksana sebanyak 55 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4 Tabel Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			4			4
4	Kepala Sub Bagian				3		3
6	Staf PNS/Pelaksana					55	55
	JUMLAH						64

Sumber : Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

Keberadaan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pendukung utama pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan pelayanan kesehatan baik melalui institusi puskesmas maupun yang langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan.

- a. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5 Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan Tahun 2022

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	12	7		20
3	Bidang Pelayanan Kesehatan	4	6	1		11
4	Bidang P2P	1	10	1		12
5	Bidang Kesehatan Masyarakat	1	7	1		9
6	Bidang Sumber Daya Kesehatan	2	8	1		11
7	UPT. RSUD H. Boedjasin	33	179	46	2	260
8	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap	1	34	33		68
9	UPT Labkes		4	2		6
10	UPT IFK	2	8	2		12
11	UPT Puskesmas Pelaihari	5	47	8		60
12	UPT Puskesmas Angsau	3	27	8		38
13	UPT Puskesmas S. Riam		17	7		24
14	UPT Puskesmas Panyipatan		15	7		22
15	UPT Puskesmas Batakan		10	6		16
16	UPT Puskesmas Takisung		23	4		27
17	UPT Puskesmas Jorong	1	20	6		27
18	UPT Puskesmas Asam-Asam	4	15	10		29
19	UPT Puskesmas Kintap	1	23	5		29
20	UPT Puskesmas Sei Cuka		15	4		19

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
21	UPT Puskesmas Tajau Pecah		26	10		36
22	UPT Puskesmas T. Ulang	2	18	5		25
23	UPT Puskesmas Bati-Bati	2	25	5		32
24	UPT Puskesmas Kait-Kait	2	12	6		20
25	UPT Puskesmas Kurau		16	7		23
26	UPT Puskesmas Padang Luas		12	9		21
27	UPT Puskesmas Tirta Jaya	1	28	2		31
28	UPT Puskesmas T. Habulu		11	9		20
29	UPT Puskesmas B. Makmur		15	12		27
30	UPT Puskesmas Bentok Kampung		16	3		19
31	UPT Puskesmas Durian Bungkok		12	5		17

Sumber : Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

- b. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT menurut tingkat pendidikan tahun 2022

No	Unit Kerja	Golongan						Jmlh
		S-2	S-1	DIII	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Dinas	1						1
2.	Sekretariat		7	9	4			20
3.	Bidang Pelayanan Kesehatan		6	5				11

No	Unit Kerja	Golongan						Jmlh
		S-2	S-1	DIII	SMA	SMP	SD	
4.	Bidang P2PL	1	6	5				12
5.	Bidang Kesehatan Masyarakat	1	5	3				9
6.	Bidang Sumber Daya Kesehatan	2	2	6	1			11
7	UPT. RSUD H. Boedjasin	26	77	146	7	2	2	260
8	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap	1	26	41				68
9	UPT Labkes		1	3	2			6
10	UPT IFK		6	6				12
11	UPT Puskesmas Pelaihari	2	15	40	3			60
12	UPT Puskesmas Angsau		11	25	2			38
13	UPT Puskesmas S. Riam		6	18				24
14	UPT Puskesmas Panyipatan		5	15	2			22
15	UPT Puskesmas Batakan		9	6	1			16
16	UPT Puskesmas Takisung		8	18	1			27
17	UPT Puskesmas Jorong	1	3	22	1			27
18	UPT Puskesmas Asam-Asam		6	21	2			29
19	UPT Puskesmas Kintap		9	18	2			29
20	UPT Puskesmas Sei Cuka	1	5	11	2			19
21	UPT Puskesmas Tajau Pecah		9	24	3			36
22	UPT Puskesmas T. Ulang		8	16	1			25
23	UPT Puskesmas Bati-Bati	1	10	18	2	1		32

No	Unit Kerja	Golongan						Jmlh
		S-2	S-1	DIII	SMA	SMP	SD	
24	UPT Puskesmas Kait-Kait		5	14	1			20
25	UPT Puskesmas Kurau		5	16	2			23
26	UPT Puskesmas Padang Luas		4	15	2			21
27	UPT Puskesmas Tirta Jaya		9	17	5			31
28	UPT Puskesmas T. Habulu		4	15	1			20
29	UPT Puskesmas B. Makmur	1	5	21				27
30	UPT Puskesmas Bentok Kampung		6	12	1			19
31	UPT Puskesmas Durian Bungkok		4	12	1			17

Sumber : Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022

g. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari Retribusi daerah dan Lain-Lain PAD yang sah dan alokasi anggaran pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 102.740.333.188 dengan Realisasi sebesar Rp 93.633.469.254 dan capaian persentase sebesar 91,14%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.7 Realisasi Pendapatan Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Daerah	120.000.000	65.200.000	54,33 %
2	Lain-Lain PAD yang Sah	102.620.333.188	93.568.269.254	91,18%
Jumlah		102.740.333.188	93.633.469.254	91,14%

Sumber : Laporan realisasi anggaran Aplikasi SIPD s.d 31 Desember 2022

h. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang alokasi anggaran belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp

450.120.221.110 dengan Realisasi sebesar Rp 355.425.470.790 dan capaian persentase sebesar 78,96%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.8 Realisasi Belanja Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	BELANJA OPERASI	338.477.094.295	278.893.087.500	82,40%
1	Belanja Pegawai	118.492.691.806	103.349.013.245	87,22%
2	Belanja Barang dan Jasa	219.984.402.489	175.544.074.255	79,80%
	BELANJA MODAL	111.643.126.815	76.532.383.290	68,55%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.451.250.611	49.553.142.376	62,37%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.748.084.202	25.641.327.743	83,39%
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.427.292.002	1.268.012.171	88,84%
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.500.000	14.925.000	90,45%
Jumlah		450.120.221.110	355.425.470.790	78,96%

Sumber : Laporan realisasi anggaran Aplikasi SIPD s.d 31 Desember 2022

1.4 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Permasalahan Dinas Kesehatan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat 4 (Empat) kebijakan strategi dalam pembangunan kesehatan di tahun 2022 yaitu :
 - a. Penurunan Angka Stunting
 - b. Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
 - c. Perbaikan pengelolaan system JKN

d. Penguatan Pelayanan kesehatan serta obat dan alat kesehatan

2. Kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) s.d Desember 2022

Pencegahan terhadap penyakit akan berpengaruh pada angka kesakitan dengan sendirinya juga akan mempengaruhi Angka Harapan Hidup, pelayanan pencegahan terhadap penyakit, Dinas Kesehatan telah melakukan upaya-upaya seperti pelayanan imunisasi dan vaksinasi di tahun 2022 hal ini dampak adanya pandemic COVID-19 yang mengharuskan masyarakat *Physical Distancing* dan kebijakan Bupati Tanah Laut untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Dinas Kesehatan juga melaksanakan pelayanan penyuluhan penyakit menular dan tidak menular dimana pencegahan penyakit sangat diutamakan, di masa pandemic COVID-19 saat ini focus utama Dinas Kesehatan adalah pencegahan dan penanganan pandemic COVID-19.

Jumlah kasus COVID-19 tahun 2020-2022 yang positif sebanyak 9.631 orang, yang sembuh sebanyak 9.381 orang dan meninggal 250 orang, yaitu :

- a. Tahun 2020 Positif 1.488 orang, sembuh 1.449 orang, meninggal 39 orang.
- b. Tahun 2021 Positif 6.620 orang, sembuh 6.433 orang, meninggal 187 orang.
- c. Tahun 2022 Positif 1.523 orang, sembuh 1.499 orang, meninggal 24 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan berdasarkan Surat Edaran Ditjen P2P Kemenkes RI Nomor SR.01.02/C.IV/2428/2022 perihal perubahan sasaran vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut, maka setiap Fasyankes melaksanakan kegiatan vaksinasi berdasarkan juknis-juknis yang telah ditetapkan dengan jumlah sasaran yang berbeda berdasarkan kategori, tenaga kesehatan, masyarakat umum, lansia, petugas public, ibu hamil dan remaja dengan total keseluruhan sasaran adalah 308.028 sasaran. Dengan perincian penjabaran sebagai berikut :

Target	308.028	Dosis 1	263.198	85.45%
		Dosis 2	211.199	68.56%
		Booster 1	68.157	22.13%
		Booster 2	1.445	6.03%

Lansia

Target	22.198	Dosis 1	19.691	88.71%
		Dosis 2	13.431	60.51%
		Booster 1	4.341	19.56%
		Booster 2	19	0.09%

Anak-Anak

Target	38.063	Dosis 1	29.763	78.19%
		Dosis 2	21.906	57.55%

Dari cakupan vaksinasi diatas, cakupan vaksin booster belum mencapai yang diharapkan atau masih cukup rendah dari target 70%. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kuatnya pengaruh HOAX di media social, berkaitan dengan agama dan kepercayaan dan larangan dari orang terdekat.

b. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah ketersediaan sumber dana yang jumlahnya terbatas. Diantara pilihan-pilihan kebijakan yang ada sudah barang tentu ada hal-hal yang harus dipilih untuk dikedepankan sebagai prioritas, karena jika semuanya dilaksanakan dengan menggunakan dana yang ada dengan membagi secara merata, akan berpotensi target yang dicanangkan sulit untuk dicapai atau dengan kata lain sulit untuk melihat hasil yang riil dari pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisa dan penelaahan terhadap Visi dan Misi RPJPD, RPJMD, Prioritas Nasional dan Provinsi, masukan dari forum konsultasi publik, serta isu dan kondisi riil terbaru maka dirumuskanlah hal yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2020. Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun 2022 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, yang keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.9 Tabel Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Sasaran
1	Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan
2	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	

Sumber RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023

c. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Perencanaan pembangunan tahun 2020 ini merupakan tahun kedua dari tahapan ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanah Laut Tahun 2018-2023, perencanaan tahun 2020 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016, hasil evaluasi RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2018-2023, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan nasional memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memperhatikan prioritas nasional dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan

pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 disajikan di Tabel 1.10 berikut:

Tabel 1.10 Tabel Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup
			Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan <i>On Call</i>

1.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintah di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum.
4. Perumahan Rakyat.
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
6. Sosial.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM, hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing - masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 12 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11 Tabel Jenis Pelayanan Dasar SPM Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut

NO	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Bidang Kesehatan : 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB) 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Pelaksanaan Kinerja

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Bupati Tanah Laut.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berikut IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut:

Tabel 2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	≤205	50,5	10%
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	≤18,6	12,3	9,2%
3	Prevelensi Gizi Stunting	≤21 %	5,4%	20%
4	Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,202	25
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,9	83,242	97

1. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu pada tahun 2022 sebesar 50,5 per 100.000 kelahiran hidup dimana angka tersebut diperoleh dari perhitungan yang mana pada tahun 2022 ini ada 3 kasus kematian ibu dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 5.936 orang, sehingga ditemukan hasil AKI yaitu 50,5 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut dibawah target nasional (RPJMN) yaitu sebesar 205 per 100.000 kelahiran hidup.

2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi pada tahun 2022 jumlah absolut kematian bayi sebesar 73 kematian bayi dari 5.396 kelahiran hidup, yang berarti Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2022 sebesar 12,3 per 1000 kelahiran hidup (73 kematian), yang artinya masih terjadi peningkatan dibanding tahun 2021

dimana AKB sebesar 11,3 per 1.000 kelahiran hidup, serta masih diatas target sebesar 9,2 per 1000 kelahiran hidup (59 kematian) yang artinya AKB masih belum seperti yang diharapkan. Akan tetapi capaian AKB tahun 2022 sebesar 12,3 per 1.000 kelahiran hidup, masih dibawah angka target nasional (RPJMN) sebesar 18,6 per 1000 kelahiran hidup.

3. Prevelansi Gizi Stunting

Prevelansi Gizi Stunting Pada tahun 2022 prevalensi stunting (TB/U) pada Balita sebesar 5.4 % dari target <21 % yaitu sebanyak 1325 orang Balita gizi stunting dari 24385 Balita yang terentry di EPPGBM. Sebaran prevalensi stunting yang terbanyak adalah di wilayah kerja Puskesmas Padang Luas sebesar 23 %, dari data ini Dinas Kesehatan dapat menentukan lokus untuk penanganan gizi stunting.

4. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 adalah 0,202 berarti masih perlu menjadi perhatian dan kerja keras dari Dinas Kesehatan untuk mencapai target yaitu 0,8. Untuk pencapaian indikator ini hanya 25% atau termasuk kategori tidak berhasil, namun dari tabel diatas IKS Kabupaten Tanah laut menunjukkan meningkat dibanding tahun 2021 yakni 0,17 menjadi 0,202 atau meningkat 0,032.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat Dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2022 mencapai 83,242 masih berada di bawah target yaitu 85,9 atau dengan capaian sebesar 97% atau dikategorikan berhasil, dan dari pengukuran IKM selama 5 tahun, IKM Kabupaten Tanah Laut berada di angka rata-rata 83 %, dan masih berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2 Tabel Indikator kinerja kunci keluaran

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, rasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	4 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	4 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td) = 1365 2. Tablet Tambah Darah = 613890 3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil= 6821 4. Kartu ibu/rekam medis ibu= 6821 5. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) = 6821	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1. Dokter spesialis kebidanan = 4 2. Bidan= 261 3. Perawat= 218	Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Formulir Partograf = 6821 2. Kartu ibu (rekam medis)= 6821 3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) = 6821	Dinas Kesehatan	

				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1. Dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan = 4 2. Bidan = 261 3. Perawat = 218	Dinas Kesehatan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Vaksin Hepatitis B0 = 6201 2. Vitamin K1 injeksi = 6201 3. Salep/tetes mata antibiotik = 6201 4. Formulir bayi baru lahir = 6201 5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) = 6201 6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) = 6821	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1. Dokter spesialis Anak = 3 2. Bidan = 261 3. Perawat = 218	Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) = 31155 2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) = 31155 3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)= 31155 4. Vitamin A Biru = 2925 5. Vitamin A Merah = 26332	Dinas Kesehatan	

						6. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib, Campak, Rubella = 4134 7. Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella = 5239 8. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) = 120045 9. Peralatan Anafilaktik = 79		
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1. Bidan = 261 2. Dokter = 47 3. Perawat = 218 4. Ahli Gizi = 40 5. Guru PAUD = 832 6. Kader Kesehatan= 2232	Dinas Kesehatan	
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Buku raport kesehatanku= 1207 2. Buku pemantauan kesehatan= 1207 3. Kuesioner skrining kesehatan = 51987 4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah= 49879 5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah	Dinas Kesehatan		

						dan remaja di luar sekolah = 2108		
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1. Dokter/Dokter gigi = 21 2. Bidan = 21 3. Perawat = 21 4. Ahli Gizi = 21 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat = 21 6. Guru = 323 7. Kader Kesehatan = 2170	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. KIT IVA Tes = 21 2. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) = 21 3. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) = 3000	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter = 47 2. Bidan = 261 3. Perawat = 218 4. Ahli Gizi = 40 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat = 32 6. Tenaga Non Kesehatan Terlatih = 2232	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol = 21122 2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen	Dinas Kesehatan	

						Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) = 21 3. Buku kesehatan lansia = 300		
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter = 47 2. Bidan = 261 3. Perawat = 218 4. Ahli Gizi = 40 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat = 32 6. Tenaga Non Kesehatan Terlatih = 167	Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) = 2000 2. Tensimeter = 21 3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) = 21	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter = 47 2. Bidan = 261 3. Perawat = 218 4. Tenaga Kesehatan Masyarakat = 32	Dinas Kesehatan	

		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet = 21 2. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) = 2000 3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) = 21	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter = 27 2. Bidan = 261 3. Perawat = 218 4. Ahli Gizi = 40 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat = 32	Dinas Kesehatan	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru = 21 2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi = 2 3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan = 21 4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) = 2500	Dinas Kesehatan	

				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya = 21	Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering = 6000 2. Catridge tes cepat molekuler = 1000 3. Formulir pencatatan dan pelaporan = 350 4. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) = 23 5. Reagen Zn TB = 300 6. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 = 6000	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) = 23 2. Penata Rontgen = 1 3. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai = 70 4. Tenaga kesehatan masyarakat = 32	Dinas Kesehatan	

						5. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru = 4 6. Perawat = 218 7. Penata Rontgen = 1		
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Tes cepat HIV (RDT) pertama = 7000 2. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) = 23 3. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK = 7000 4. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai = 7000	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin = 4 2. Perawat = 218 3. Bidan = 261 4. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) = 23 5. Tenaga kesehatan masyarakat = 32	Dinas Kesehatan	

						6. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu = 10		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3 Tabel Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 447 $\frac{447}{353190} \times 100$ Jumlah Penduduk di Kabupaten = 353.190	0.12%	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 4 $\frac{4}{4} \times 100$ Jumlah RS di Kabupaten = 4	100%	Dinas Kesehatan	UMUM = 2 RS SWASTA = 2 RS
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5.559 $\frac{5559}{6821} \times 100$ Jumlah ibu hamil di Kabupaten = 6.821	81.5%	Dinas Kesehatan	

		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 5.939 $\frac{5939}{6511} \times 100$ Jumlah ibu bersalin di Kabupaten = 6.511	91.2%	Dinas Kesehatan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5.927 $\frac{5927}{6201} \times 100$ Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten = 6.201	95.6%	Dinas Kesehatan	
		6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 26.381 $\frac{26381}{31155} \times 100$ Jumlah balita di Kabupaten = 31.155	84.7%	Dinas Kesehatan	

		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 51.537 $\frac{51537}{57987} \times 100$ Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten = 57.987	99.1%	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 119.997 $\frac{119997}{218115} \times 100$ Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten = 218.115	55%	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 21.122 $\frac{21122}{37832} \times 100$	55.8%	Dinas Kesehatan	

				Jumlah balita di Kabupaten = 37.832			
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 15.264 $\frac{15264}{22619} \times 100$ Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten = 22.619	67.5%	Dinas Kesehatan	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 4.411 $\frac{4411}{4027} \times 100$ Jumlah penderita DM di Kabupaten = 4.027	109.5%	Dinas Kesehatan	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 437 $\frac{437}{492} \times 100$	88.8%	Dinas Kesehatan	

				Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten = 492			
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2205 $\frac{2205}{5701} \times 100$ Jumlah penderita TBC di Kabupaten = 5701	38.7%	Dinas Kesehatan	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 3974 $\frac{3974}{7973} \times 100$ Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten = 7973	49.8%	Dinas Kesehatan	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden RI No.7 Th 1999 tentang AKIP).

Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan harus terus selalu dilakukan secara berkesinambungan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), prevalensi gizi stunting, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan meningkatkan indeks keluarga sehat.

Untuk menggambarkan kinerja sasaran strategis target dan realisasinya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dari Eselon II sampai dengan Eselon IV selama kurun waktu dari tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Tabel Target dan Realisasi Capaian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1.Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	95%	81,5%	85,8%
		2.Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	95%	91,2%	96%
		3.Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	98%	95,6%	97,5%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		4.Persentase Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	95%	84,7%	89,1%
2	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1.Persentase Rumah Tangga berPHBS	50%	53%	106%
		2.Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1.Persentase desa STBM	84,6%	100%	120%
		2.Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	83%	105%
		3.Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	83%	119%
4	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular	100%	73,8%	73,8%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		yang dilayani sesuai standar			
		2.Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	100%	100%
		3.Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	70%	70%
6	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1.Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	58%	0%	0%
		2.Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	100%	100%	100%
		3.Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%	100%	100%
		4.Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	40%	0%	0%
		5.Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	52%	100%	192%
		6.Persentase penduduk miskin	100%	99,62%	90,23%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		yang menjadi peserta JKN			
7	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	75%	70%	80%
		2.Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	100%	71%	100%
		3.Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	92 %	92%	100%
		4.persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100 %	90%	90%
8	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1.Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%
		2.Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	89%	89%	100%
		3.Persentase Pelayanan	100%	100%	100%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		Kepegawaian sesuai aturan			
		4.Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%	100%
		5.Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%
		6.Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	73	81,30	111,36

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal antara lain:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis bidang kesehatan.
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas Program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal.
3. Melakukan inovasi anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku di masa pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir untuk terus memberikan dan meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat serta mencapai target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung keberhasilan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
4. Mendukung dan mensukseskan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur Pasca Bencana dan Pemenuhan Target-Target Indikator RPJMD khususnya Bidang Kesehatan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

A. Tugas Pembantuan Yang di Terima Dari Pemerintah / Pemerintah provinsi Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan
4. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
7. Permasalahan dan Solusi

B. Tugas Pembantuan Yang diberikan Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
4. Sarana dan Prasarana

C. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Laut. Dinas Kesehatan merupakan unsur pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun tugas dari Dinas Kesehatan yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas
 - e. Pembinaan UPT Dinas
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang kesehatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada bidang kesehatan meliputi :

Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Pada Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan kesehatan orang dengan	Sesuai standar pelayanan kesehatan	Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Setiap orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan Tuberkulosis (TB)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
	Tuberkulosis (TB)	Tuberkulosis (TB)		sesuai standar
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien Tuberkulosis (TB), pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien Tuberkulosis (TB), pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut kurun waktu kehamilan. Berikut target pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2022:

Tabel 4.2 Target Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2022

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
	Jumlah ibu hamil yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah kerjanya kurun waktu satu tahun.

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan/ Dokter/ Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Berikut target pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2022:

Tabel 4.3 Target Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2022

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir merupakan pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan/ perawat/ Dokter/ Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Berikut target pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2022 :

Tabel 4.4 Target Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2022

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
	Jumlah semua bayi baru lahir yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan/ Perawat/ Dokter/ DLP/ Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan kesehatan, meliputi Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran Panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, dan pemberian imunisasi dasar lengkap. Berikut target pelayanan kesehatan balita tahun 2022 :

Tabel 4.5 Target Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2022

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan anak	100%
	Jumlah balita 0-59 tahun yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas, standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia), penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas), penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen, penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garputala. Berikut target pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2022 :

Tabel 4.6 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan	100%
	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun ajaran	

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan skrining diantaranya adalah deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut, deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah, deteksi gangguan mental emosional dan perilaku. Berikut target pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2022 :

Tabel 4.7 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2022

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Lingkup skrining kesehatan adalah deteksi hipertensi, dengan mengukur tekanan darah, deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah, deteksi kadar kolesterol dalam darah, deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental State Examination* (MMSE)/ Tes Mental Mini atau *Abbreviated Mental Test* (AMT) dan *Geriatric Depression Scale* (GDS). Berikut target pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2022:

Tabel 4.8 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2022

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
	Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi dengan sasaran penduduk usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten/ Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya kurun waktu satu tahun. Berikut capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi tahun 2022 :

Tabel 4.9 Target Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2022

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
	Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan prevalensi Kabupaten/ Kota kurun waktu 1 tahun pada tahun yang sama	

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.

Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut :

- 1) Edukasi
- 2) Aktifitas fisik
- 3) Terapi nutrisi medis
- 4) Intervensi farmakologis

Berikut target pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus tahun 2022:

Tabel 4.10 Target Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%
	Jumlah penyandang Diabetes Melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional di wilayah kerja kurun waktu 1 tahun pada tahun yang sama	

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan, pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau tindakan kebersihan diri ODGJ berat. Berikut target pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tahun 2022:

Tabel 4.11 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	100%
	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota kurun waktu 1 tahun yang sama	

11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

Pelayanan tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan

TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh). Berikut target pelayanan kesehatan orang dengan TB tahun 2022 :

Tabel 4.12 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Tahun 2022

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%
	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja kab/kota kurun waktu 1 tahun yang sama	

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Berikut target pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tahun 2022 :

Tabel 4.13 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2022

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang sama	

4.3 Realisasi

Realisasi atau pencapaian pelayanan dasar SPM pada bidang kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Tabel Indikator Pencapaian SPM Ibu hamil s.d Balita

NO	PUSKESMAS	TARGET (%)	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL			PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN			PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR			PELAYANAN KESEHATAN BALITA		
			Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	100%	243	179	73,7	232	181	78,0	221	178	80,5	1111	365	32,9
2	Batakan	100%	249	196	78,7	238	217	91,2	227	220	96,9	1138	1119	98,3
3	Jorong	100%	270	235	87,0	258	286	110,9	245	278	113,5	1234	1137	92,1
4	Asam -Asam	100%	386	407	105,4	368	398	108,2	347	389	112,1	1760	1563	88,8
5	Tajau Pecah	100%	234	172	73,5	223	188	84,3	213	187	87,8	1067	889	83,3
6	Durian Bungkok	100%	305	236	77,4	291	273	93,8	282	280	99,3	1391	1172	84,3
7	Kintap	100%	523	525	100,4	500	357	71,4	476	503	105,7	2390	2656	111,1
8	Sei Cuka	100%	308	239	77,6	294	257	87,4	280	260	92,9	1406	1424	101,3
9	Pelaihari	100%	862	710	82,4	823	743	90,3	784	740	94,4	3940	3374	85,6
10	Sei Riam	100%	132	103	78,0	126	111	88,1	120	97	80,8	603	496	82,3
11	Angsau	100%	525	389	74,1	501	396	79,0	477	390	81,8	2399	1919	80,0
12	Tanjung Habulu	100%	135	99	73,3	129	120	93,0	123	124	100,8	617	554	89,8

NO	PUSKESMAS	TARGET (%)	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL			PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN			PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR			PELAYANAN KESEHATAN BALITA		
			Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%
13	Tirta Jaya	100%	242	203	83,9	231	215	93,1	219	214	97,7	1105	874	79,1
14	Takisung	100%	641	440	68,6	612	503	82,2	584	512	87,7	2930	2502	85,4
15	Bati - Bati	100%	357	302	84,6	340	304	89,4	324	301	92,9	1630	1456	89,3
16	Kait - Kait	100%	161	122	75,8	154	143	92,9	146	148	101,4	734	514	70,0
17	Bentok Kampung	100%	355	286	80,6	339	349	102,9	323	342	105,9	1622	1347	83,0
18	Tambang Ulang	100%	352	314	89,2	336	293	87,2	319	327	102,5	1607	1264	78,7
19	Kurau	100%	76	56	73,7	73	65	89,0	69	50	72,5	347	163	47,0
20	Padang Luas	100%	196	143	73,0	187	148	79,1	178	144	80,9	896	726	81,0
21	Bumi Makmur	100%	269	203	75,5	256	242	94,5	244	243	99,6	1228	867	70,6
	JUMLAH		6.821	5559	81,5	6.511	5939	91,2	6.201	5927	95,6	31155	26381	84,7

Tabel 4.15 Tabel Indikator Pencapaian SPM Usia Pendidikan Dasar S.d Penderita Hipertensi

NO	PUSKESMAS	TARGET (%)	PELAYANAN KESEHATAN USIA PENDIDIKAN DASAR			PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF			PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT			PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI		
			Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	100%	2.184	1996	91,4	7.779	6207	79,8	1.349	836	62,0	807	758	94,0
2	Batakan	100%	1.559	1528	98,0	7.965	4012	50,4	1.380	780	56,5	826	592	71,7
3	Jorong	100%	502	502	100,0	8.638	3735	43,2	1.498	742	49,5	896	363	40,5
4	Asam -Asam	100%	4.350	4119	94,7	12.322	4188	34,0	2.137	453	21,2	1.278	876	68,6
5	Tajau Pecah	100%	2.059	2059	100,0	7.477	6440	86,1	1.297	907	69,9	775	632	81,5
6	Durian Bungkok	100%	2.259	2259	100,0	9.745	1423	14,6	1.690	979	57,9	1.011	642	63,5
7	Kintap	100%	4.392	4392	100,0	16.740	7371	44,0	2.903	1706	58,8	1.736	1709	98,4
8	Sei Cuka	100%	2.243	2243	100,0	9.846	3378	34,3	1.708	1548	90,6	1.021	706	69,1
9	Pelaihari	100%	8.891	8891	100,0	27.588	14140	51,3	4.784	2005	41,9	2.861	1824	63,8
10	Sei Riam	100%	778	778	100,0	4.225	1168	27,6	732	337	46,0	438	342	78,1
11	Angsau	100%	4.145	4145	100,0	16.793	5264	31,3	2.912	1998	68,6	1.741	988	56,7
12	Tanjung Habulu	100%	718	718	100,0	4.321	2452	56,7	749	553	73,8	448	285	63,6
13	Tirta Jaya	100%	1.344	1344	100,0	7.740	5488	70,9	1.342	1312	97,8	803	725	90,3

NO	PUSKESMAS	TARGET (%)	PELAYANAN KESEHATAN USIA PENDIDIKAN DASAR			PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF			PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT			PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI		
			Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%
14	Takisung	100%	4.362	4362	100,0	20.522	20522	100,0	3.558	1206	33,9	2.128	1659	78,0
15	Bati - Bati	100%	3.044	3044	100,0	11.410	7979	69,9	1.978	1195	60,4	1.183	144	12,2
16	Kait - Kait	100%	1.254	1254	100,0	11.362	4909	43,2	893	510	57,1	1.178	282	23,9
17	Bentok Kampung	100%	3.210	3210	100,0	5.084	1629	32,0	1.970	278	14,1	527	220	41,7
18	Tambang Ulang	100%	1.041	1041	100,0	11.260	7348	65,3	1.953	1414	72,4	1.168	715	61,2
19	Kurau	100%	347	347	100,0	2.431	2612	107,4	422	354	83,9	252	364	144,4
20	Padang Luas	100%	1.455	1455	100,0	6.273	3425	54,6	1.087	841	77,4	650	812	124,8
21	Bumi Makmur	100%	1.850	1850	100,0	8.595	6307	73,4	1.490	1168	78,4	891	626	70,2
	JUMLAH		51.987	51537	99,1	218.115	119997	55,0	37.832	21122	55,8	22.619	15264	67,5

Tabel 4.16 Tabel Indikator Pencapaian SPM Diabetes Melitus s.d HIV

NO	PUSKESMAS	TARGET (%)	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS			PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA			PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS			PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV		
			Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%
1	Panyipatan	100%	144	111	77,3	18	25	142,5	203	38	18,7	281	96	34,2
2	Batakan	100%	147	118	80,2	18	28	155,9	208	95	45,7	288	28	9,7
3	Jorong	100%	160	189	118,5	19	23	118,0	226	52	23,0	347	99	28,5
4	Asam -Asam	100%	228	103	45,3	28	18	64,8	322	142	44,1	448	405	90,4
5	Tajau Pecah	100%	138	127	92,0	17	19	112,7	195	68	34,9	280	148	52,9
6	Durian Bungkok	100%	180	180	100,0	22	12	54,6	255	39	15,3	354	111	31,4
7	Kintap	100%	309	334	108,1	38	9	23,8	437	152	34,8	611	214	35,0
8	Sei Cuka	100%	182	557	306,4	22	12	54,0	257	73	28,4	363	107	29,5
9	Pelaihari	100%	509	483	94,8	62	63	101,2	721	347	48,1	889	408	45,9
10	Sei Riam	100%	78	140	179,5	10	11	115,4	110	63	57,3	152	97	63,8
11	Angsau	100%	310	359	115,8	38	27	71,3	439	206	46,9	793	528	66,6
12	Tanjung Habulu	100%	80	77	96,5	10	10	102,6	113	5	4,4	156	23	14,7

NO	PUSKESMAS	TARGET (%)	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS			PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA			PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS			PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV		
			Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%	Sasaran	Capaian	%
13	Tirta Jaya	100%	143	69	48,3	17	19	108,8	202	90	44,6	279	125	44,8
14	Takisung	100%	379	392	103,4	46	47	101,5	536	160	29,9	742	349	47,0
15	Bati - Bati	100%	211	103	48,9	26	26	101,0	298	120	40,3	416	346	83,2
16	Kait - Kait	100%	210	45	21,4	26	8	31,2	135	61	45,2	186	173	93,0
17	Bentok Kampung	100%	94	133	141,7	11	16	139,5	297	215	72,4	409	176	43,0
18	Tambang Ulang	100%	208	131	63,0	25	8	31,5	294	100	34,0	406	86	21,2
19	Kurau	100%	45	289	643,8	5	5	91,2	64	15	23,4	51	92	180,4
20	Padang Luas	100%	116	234	202,0	14	18	127,2	164	94	57,3	206	115	55,8
21	Bumi Makmur	100%	159	237	149,3	19	33	170,2	225	70	31,1	316	248	78,5
	JUMLAH		4.027	4411	109,5	492	437	88,8	5.701	2205	38,7	7.973	3974	49,8

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 selain merupakan kewajiban perundang-undangan, maka tujuan pokok penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2022, termasuk capaian kinerjanya.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Capaian realisasi anggaran pendapatan daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah. Alokasi Anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 102.740.333.188 dengan Realisasi sebesar Rp 93.633.469.254 dan capaian persentase sebesar 91,14%.
2. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal Alokasi anggaran belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 450.120.221.110 dengan Realisasi sebesar Rp 355.425.470.790 dan capaian persentase sebesar 78,96%.

3. Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022 melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 serta dokumen Rencana Strategis perangkat daerah pengampu SPM. Dari pelaksanaan tersebut tahun 2022 diperoleh hasil yang cukup baik dengan dapat mencapai standar minimal pada beberapa indikator capaian pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan. Namun masih terdapat beberapa pelayanan dasar SPM yang masih kurang realisasinya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan urusan Bersama dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi, perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan UPT Dinas, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kondisi yang belum sesuai dengan seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut bersama – sama dengan segenap komponen pembangunan terus bekerja sama untuk mewujudkan harapan – harapan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Kedepannya akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan pelayanan pada tahun-tahun mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan pada tahun 2022 dapat berjalan baik, dengan manfaat dan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini disampaikan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kabupaten Tanah Laut.